

Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan: Mengukur Efektivitas Belanja Modal Daerah Dalam Mendorong Investasi Di Daerah

by Akhmad Syakir Kurnia

Submission date: 07-Apr-2021 09:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 1552410795

File name: odal_Daerah_Dalam_Mendorong_Investasi_Di_Daerah_2018_Edisi_2.pdf (9.82M)

Word count: 3247

Character count: 20914

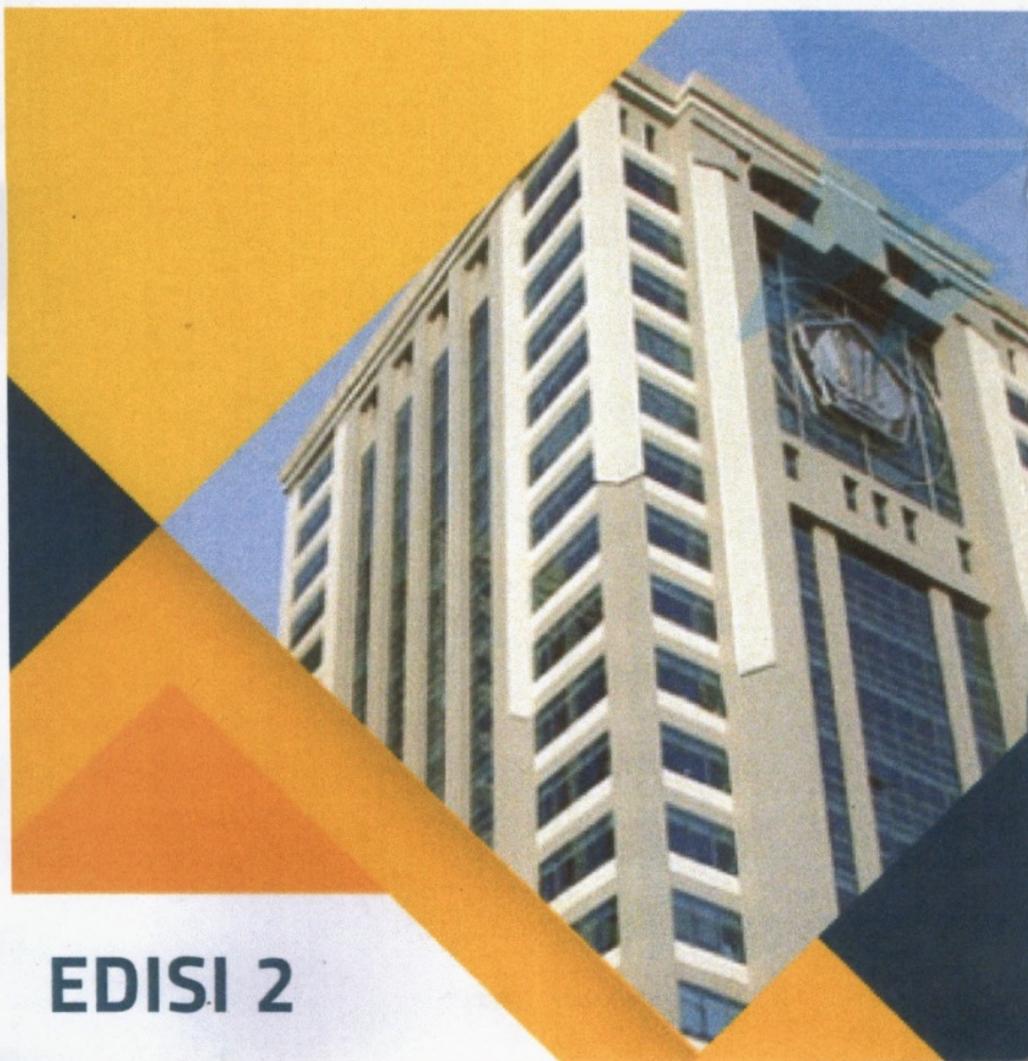


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BUNGA RAMPAI REKOMENDASI KEBIJAKAN

FORUM EKONOM KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018



EDISI 2

BUNGA RAMPAI REKOMENDASI KEBIJAKAN

FORUM EKONOM KEMENTERIAN KEUANGAN 2018

JILID 2

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
2018

BUNGA RAMPAI REKOMENDASI KEBIJAKAN

FORUM EKONOM KEMENTERIAN KEUANGAN 2018

© 2019, Kementerian Keuangan

Pembina:
Suahasil Nazara

Pengarah:
Adriyanto, Ph.D.

Tim Penyusun:
Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) Tahun 2018

Laporan dan Dokumentasi :
Tim PKEM, BKF, Tim Biro KLI, Sekretariat Jenderal

Editor:
Riznaldi Akbar, Ph.D.

Sekretariat :
Tim Pusat Kebijakan Ekonomi Makro-BKF, Tim Organisasi dan Tata Laksana-Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Tim Biro Komunikasi dan Layanan Informasi-Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan

Desain Grafis:
Tim Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Penerbit:
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-53083-5-2



DAFTAR FORUM EKONOM

KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018

NAMA	UNIVERSITAS
Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec	Universitas Sumatera Utara
Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc	Universitas Andalas
Prof. Dr. Bernadette Robiani, S.E., M.Sc	Universitas Sriwijaya
Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D	Universitas Padjadjaran
Akhmad Syakir Kurnia, Ph.D	Universitas Diponegoro
Dr. Rudi Purwono	Universitas Airlangga
Poppy Ismalina, M.Ec.Dev., Ph.D	Universitas Gajah Mada
Prof. Dr. Mansur Afifi	Universitas Mataram
Prof. Dr. Eddy Suratman	Universitas Tanjungpura
Prof. Muhammad Handry Imansyah, MAM., Ph.D	Universitas Lambung Mangkurat
Mohamad Ahlis Djirimu, S.E., DEA., Ph.D	Universitas Tadulako
Dr. Noldy Tuerah, S.E., MA	Universitas Sam Ratulangi
Prof. Marsuki, DEA	Universitas Hasanuddin
Dr. Rully N Wurarah	Universitas Papua
Dr. Teddy Christianto Leasiwal, S.E., M.Si	Universitas Pattimura



DAFTAR ISI

JUDUL	iv
DAFTAR FORUM EKONOM KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018	v
DAFTAR ISI	vii
KATA SAMBUTAN	xv
PRAKATA FORUM EKONOM	xvii
ANALISIS ATAS BELANJA PERPAJAKAN	1
Belanja Perpajakan	2
Dampak Ekonomi	6
MENAKAR DAMPAK BELANJA PAJAK PEMERINTAH: SIMULASI INPUT-OUTPUT	11
Pendahuluan	11
Permasalahan	12
Kajian Pustaka	12
Metodologi	14
Hasil Simulasi Dan Pembahasan	16
Dampak Terhadap Nilai Tambah	17

Dampak Terhadap Upah dan Gaji	18
Dampak Terhadap Kesempatan Kerja	19
Dampak Terhadap Pajak Minus Subsidi pada Produk	20
Dampak Terhadap Pajak Minus Subsidi Pada Produksi	21
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	22
Referensi	23
Lampiran	24
PROBLEMATIKA DAN STRATEGI MENINGKATKAN TAX RATIO DI SULBAR	29
Pendahuluan	29
Referensi: Pro-kontra Peningkatan Tax Ratio dan Strategi Meningkatkan Tax Ratio	30
Relatif Rendahnya Potensi Pendapatan Perpajakan di SulBar	33
Strategi Meningkatkan Tax Ratio di SulBar	38
Kesimpulan dan Saran	39
"LANGKAH KLASIK" DALAM MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA	43
Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangannya	43
Kebijakan	44
Kebijakan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	46
Penutup	49
Referensi	50
DAMPAK TRADE WAR TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA	51

Latar Belakang	51
Hubungan Perdagangan Indonesia, China dan Amerika Serikat	55
Dampak Perang Dagang Terhadap Perekonomian Indonesia	59
Rekomendasi	61
Referensi	62
ANALISIS DANA DESA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEMISKINAN, KESENJANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	65
Pengantar	65
Kerangka Teori dan Penelitian Sebelumnya	66
Metodoologi	68
Analisis Korelasi	68
Analisis Deskriptif	69
Hasil Penelitian dan Analisis	69
Dana Desa dan Kemiskinan	69
Dana Desa dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	71
Dana Desa dan Ketimpangan	72
Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi	74
Pemetaan Kinerja Propinsi Dan Kaitannya Dengan Distribusi Dana Desa	75
Distribusi Dana Desa dan Penurunan Kemiskinan	75
Distribusi Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi	76
Kesimpulan dan Rekomendasi	78
Referensi	80

ANALISIS PENGGUNAAN EFEKTIVITAS DANA DESA DI DAERAH	83
Rekomendasi	86
Referensi	91
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRIALISASI DESA MELALUI AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI	93
Dana Desa dan Peruntukannya	94
Industrialisasi di Indonesia	98
Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri	101
Referensi	105
INDUSTRIALISASI MELALUI DANA DESA	109
Pendahuluan	109
Efektivitas Dana Desa	113
Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Melalui Industri Desa	115
Referensi	122
KEBIJAKAN INOVATIF DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH: STRATEGI DAERAH MENARIK INVESTASI	125
Pengantar	125
Memacu Investasi untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah	127
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Investasi	128
Inovasi Daerah	129
Collaborative Governance	130
Strategi Menarik Investasi Masuk ke Daerah	131
Regulasi Investasi Daerah	131

Stabilitas Keamanan Daerah	132
Stabilitas Regulasi Daerah	132
Konsistensi Kebijakan	132
Infrastruktur Daerah	133
Infrastruktur dukungan APBN Pemerintah Nasional	133
Pembentukan BUMD	134
Perencanaan Keuangan Daerah	134
Regulasi Daerah tentang Tenaga kerja	134
Insentif fiskal dan non-fiskal daerah	135
Lokasi Kawasan Industri	135
Entrepreneurial Government	135
Daya Saing Daerah	135
Penutup	136
Referensi	137

**KEBIJAKAN INOVATIF DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI
DAERAH**

Pendahuluan	139
Membangun Daya Saing Daerah	141
Tata Kelola Pemerintahan	142
Konsekuensi Investasi Daerah	144
Implementasi Kebijakan Inovatif	145
Penutup	147
Referensi	149

POTENSI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH	151
Pendahuluan	151
Langkah-Langkah Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	152
Mengoptimalkan Ekspor Hasil Pertanian	152
Mengurangi Impor Pangan	154
Upaya Menurunkan Konsumsi Beras Nasional	156
Regenerasi Petani	158
Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	160
Catatan Penutup	164
PENGUATAN EKSPOR ANTAR WILAYAH	169
Pendahuluan	169
Penguatan Ekspor Antar Wilayah	171
Rekomendasi Kebijakan	172
MENGUKUR EFEKTIVITAS BELANJA MODAL DAERAH DALAM MENDORONG INVESTASI DI DAERAH	175
Abstract	175
Pendahuluan	175
Pembahasan	178
Penutup	182
Referensi	183

MENGUKUR EFEKTIVITAS BELANJA MODAL DAERAH DALAM MENDORONG INVESTASI DI DAERAH

Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D.

Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah

Abstract

Dengan keterbatasan kapasitas daerah dalam mengelola anggaran sebagai instrumen fiskal yang efektif serta watak kelembagaan hubungan fiskal pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia, paper ini mengembangkan model teoritik sebagai pondasi untuk mengkaji efektivitas belanja modal yang selanjutnya diharapkan menjadi framework untuk riset empiris dan kebijakan untuk mendorong efektivitas belanja modal. Model teoritik dalam paper ini memberikan tekanan pada rendahnya skala ekonomi belanja modal yang menjadi sebab rendahnya multiplier belanja modal terhadap penciptaan kapasitas ekonomi dan fiskal daerah yang penting untuk mendorong investasi yang selanjutnya dalam jangka panjang diharapkan meningkatkan *marginal tax ratio* untuk kemandirian daerah.

Keywords: desentralisasi, belanja modal, skala ekonomi, kapasitas fiskal, investasi di daerah, kemandirian daerah.

Pendahuluan

Hampir dua puluh tahun desentralisasi fiskal di Indonesia telah

berjalan dengan memberikan tekanan pada delegasi *spending power* kepada pemerintah daerah. Pertanyaannya apakah kewenangan daerah mengeksekusi fungsi alokasi belanja, mencakup di dalamnya belanja modal telah efektif mendorong investasi dan pembangunan di daerah menarik untuk selalu ditinjau. Dilihat dari indikator agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata di atas 5%, kemudian hal ini dikaitkan secara langsung sebagai indikator keberhasilan desentralisasi fiskal cenderung *overestimate* dan mengandung bias kausalitas. Apakah pertumbuhan ekonomi tersebut secara langsung bisa diklaim sebagai keberhasilan kewenangan daerah dalam mengeksekusi belanja modal tanpa melihat lebih jauh penjelasan teoritik dan fenomena empiriknya mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jangan-jangan jika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, Indonesia dan pemerintahan daerah di dalamnya tetap mengalami pertumbuhan yang sama atau bahkan lebih tinggi? Terlepas banyaknya riset-riset empiris yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan desentralisasi, riset-riset tersebut mengandung kelemahan yakni penjelasan teoritis yang tidak *robust* bagaimana kewenangan daerah untuk mengeksekusi belanja dalam sistem desentralisasi memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi (lihat misalnya Martinez-vazquez & McNab, 2003).

Di sisi yang lain, gagasan awal mengenai mengapa kewenangan fiskal perlu didesentralisasi sebenarnya didasarkan pada pertimbangan untuk mendorong layanan publik yang lebih baik dan efisien dengan memberikan tanggung jawab dan kewenangan layanan publik pada tingkatan pemerintahan yang terkecil yang paling dekat dengan masyarakat yang dilayani (Oates, 1972). Meningkatnya (kualitas) layanan publik oleh pemerintah daerah, didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah lebih tahu masalah dan preferensi masyarakat di daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat yang dianggap memberikan layanan publik yang seragam (*one-size fits all*) kepada daerah yang kondisinya beragam. Dengan demikian, secara teoritik, ide mengenai desentralisasi sebenarnya tidak dikaitkan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, meskipun secara tidak langsung desentralisasi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui lingkungan yang strategis

yang dibutuhkan bagi bekerjanya pasar yang efektif guna mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi di daerah (Qian & Weingast, 1997).

Mempertimbangkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan utama desentralisasi dan mengaitkannya secara langsung mengandung bias kausalitas, efektivitas belanja modal oleh pemerintah daerah semestinya dinilai dari berhasilnya belanja modal meningkatkan kapasitas fiskal dan kapasitas ekonomi daerah yang selanjutnya akan mendorong masuknya aliran modal ke daerah bersangkutan. Gagasan mengenai desentralisasi yang dikaitkan dengan kemampuan daerah untuk menarik masuknya aliran modal dimulai dari pemikiran Tiebout (1956) yang menyatakan bahwa desentralisasi akan menjadi dorongan bagi orang untuk bermigrasi mencari pemerintahan yang memberikan layanan publik dan menu perpajakan yang menarik dan sesuai dengan preferensinya. Dengan demikian, selain memilih pemerintahan dengan "ballot" dalam pemilihan umum, penduduk juga akan memilih pemerintahan dengan "kakinya" (*vote with one's feet*). Pada saat yang sama, pemerintahan daerah akan berkompetisi menyediakan layanan publik dan menu perpajakan yang menarik bagi orang untuk memilih tinggal di daerahnya. Dalam perkembangannya, kapasitas daerah dalam mengalokasikan belanja untuk menghasilkan layanan publik yang optimal bukan hanya menarik orang untuk masuk dan tinggal, tetapi juga akan menjadi daya tarik bagi masuknya aliran modal. Bahkan, dalam teori desentralisasi generasi kedua (*second generation theory of fiscal decentralization*), kemampuan pemerintah daerah untuk mengeksekusi fungsi alokasi yang optimal akan didorong lebih jauh melalui kompetisi yardstick (*yardstick competition*), yakni kompetisi yang dipicu oleh adanya aliran informasi antar daerah yang memungkinkan penduduk di suatu daerah bisa membandingkan kinerja daerahnya dengan daerah lainnya dan menuntut pemerintah daerahnya untuk memiliki kinerja yang paling tidak, sama atau bahkan lebih baik dibandingkan daerah lainnya yang menjadi benchmark (Salmon, 2009; Besley dan Case, 1995; Revelli, 2006; Revelli & Tovmo, 2007; Elhorst & Freret, 2009; Caldeira, 2010; Capuno, et. al, 2012). Selain itu, teori desentralisasi generasi kedua juga menekankan outcome desentralisasi melalui akuntabilitas politik serta bekerjanya mekanisme *check and balance* sebagai faktor yang paling menentukan apakah

desentralisasi mendorong kinerja sektor publik yang lebih baik ataukah sebaliknya (Oates, 2005).

Dengan kerangka berpikir yang melatarbelakangi penulisan paper ini sebagaimana telah dijelaskan, paper ini membahas efektivitas belanja modal di daerah tidak dengan mengaitkannya secara langsung dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan kinerja investasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kapasitas fiskal dalam kerangka *fiscal sustainability*, serta karakteristik ekonomi di daerah yang diukur dengan produktivitas ekonomi secara menyeluruh. Paper ini bertujuan memberikan sedikit kontribusi pada literatur kebijakan di Indonesia. Pertama, ia mengkaji kembali peran belanja modal dalam pembangunan ekonomi daerah setelah dua puluh tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Lebih spesifik, melalui paper ini efektivitas belanja modal semestinya diukur dari skala yang optimal dari belanja modal pemerintah dengan menekankan pada ukuran elastisitas jangka panjang belanja modal terhadap output dengan mendasarkan fungsi produksi sebagaimana dilakukan oleh Straub (2011). Kedua, efektivitas belanja modal seharusnya juga dilihat dari dampaknya terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sekaligus ketahanan daerah dalam menstabilkan dampak siklus bisnis (Auerbach & Gorodnichenko, 2012).

Pembahasan

Apakah belanja modal telah efektif memberikan dampak pada kinerja makroekonomi daerah merupakan pertanyaan sentral yang coba dibahas secara kritis dalam paper ini dengan mengikuti kerangka berpikir yang telah dikembangkan oleh Delong, & Summers (2012). Belanja modal oleh pemerintah daerah seharusnya berpengaruh terhadap perekonomian ekonomi daerah melalui dua cara. Pertama, dalam kerangka makroekonomi *Keynesian*, sama dengan jenis pengeluaran pemerintah lainnya, belanja modal meningkatkan permintaan agregat melalui pengganda fiskal jangka pendek, yang besarnya dapat bervariasi sesuai keadaan ekonomi (Auerbach & Gorodnichenko, 2012). Selain itu, mengingat sifat layanan infrastruktur yang seharusnya komplementer bagi investasi swasta, belanja modal akan mempengaruhi rasio surplus/defisit anggaran terhadap PDRB,

yang mana rasio tersebut dapat naik atau turun tergantung nilai pengganda fiskal (*fiscal multiplier*) dan elastisitas pendapatan terhadap output. Kongkritnya, dengan memodifikasi model yang dikembangkan Delong, & Summers (2012), dalam jangka pendek belanja modal yang memberikan kontribusi pada PDRB potensial (Δi) akan memengaruhi rasio surplus/defisit anggaran terhadap PDRB potensial (Δd) , dimana $\Delta d = t - exp$. Dengan demikian, keseimbangan anggaran pemerintah daerah dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\Delta d + h = (1 - \mu\tau)\Delta i \quad (1)$$

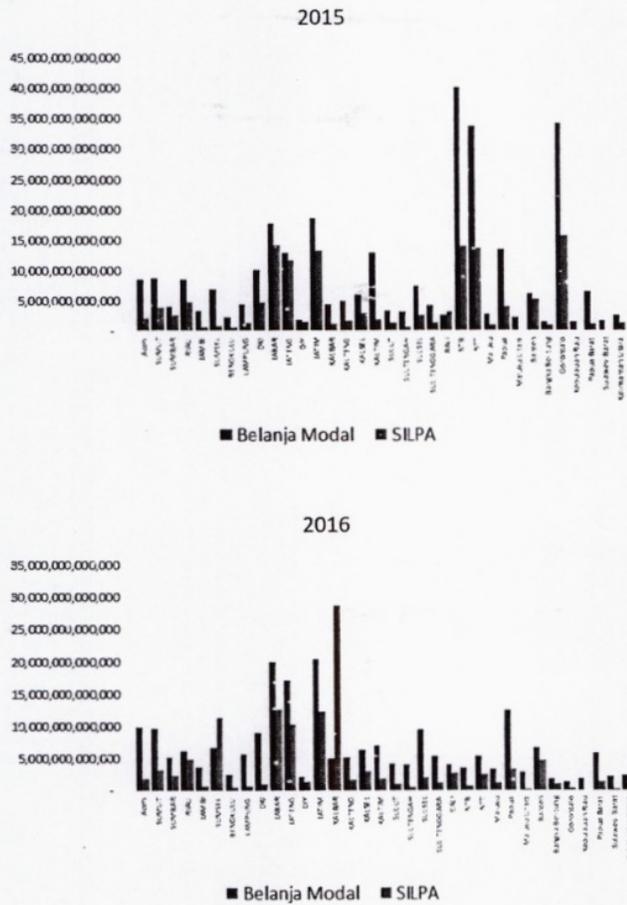
dimana μ adalah *multiplier* fiskal dan τ adalah *marginal tax ratio*. Di dalam persamaan tersebut ditambahkan variabel h , yang menunjukkan rasio transfer pemerintah pusat terhadap PDRB sebagai komponen penerimaan daerah yang masih dominan, sekaligus menunjukkan ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Salah satu isu krusial dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah adalah adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Dengan mengasumsikan dana perimbangan (h) yang fungsinya adalah mengatasi *horizontal imbalances* bersifat eksogen, serta nilai *marginal tax ratio* (τ) yang masih rendah, menggambarkan kapasitas perpajakan di daerah yang kecil. maka SILPA menunjukkan tiga hal penting. **Pertama**, nilai pengganda fiskal di daerah (μ) yang rendah. **Kedua**, skala ekonomi belanja modal di daerah (Δi) tidak optimal untuk diharapkan mendorong investasi. **Ketiga**, transfer dari pemerintah pusat (h) tidak optimal penggunaannya untuk belanja produktif untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Ketiga faktor tersebut disebabkan tidak cukupnya kapasitas daerah (*lack of capacity*) dalam mengelola keuangan daerah sebagai instrument fiskal yang optimal dalam jangka pendek.

Gambar 1. berikut menunjukkan Total Nilai Belanja Modal dan SILPA pemerintah Kabupaten Kota dan Provinsi. Secara agregat, belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi pada tahun 2016 menurun dibandingkan belanja modal tahun 2015. Begitu juga dengan SILPA tahun 2016 secara agregat lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Namun jika dilihat dari rasio SILPA terhadap belanja modal agregat

pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi mengalami kenaikan, semula 44,5% pada tahun 2015 menjadi 55,03% pada tahun 2016.

Gambar 1. Nilai Belanja Modal dan SILPA Agregat Kabupaten/Kota dan Provinsi tahun 2015 dan 2016 (Dalam Rupiah)



Sumber: diolah dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan RI. <http://www.djpk.kemendek.go.id/?p=5412>

Dalam jangka panjang, efektivitas belanja modal juga akan bekerja melalui sisi penawaran dari investasi infrastruktur publik untuk mendorong naiknya kapasitas produktif ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, indikator untuk melihat efek sisi penawaran ini adalah dengan melihat dampaknya bagi efisiensi ekonomi. Belanja modal yang tidak efisien karena kendala kelembagaan dalam proses perencanaan dan eksekusi anggaran misalnya, akan menghasilkan proyek infrastuktur publik yang buruk dalam eksekusi maupun monitoring dan evaluasinya. Dengan demikian, investasi publik tidak bisa diharapkan untuk memberikan dampak yang optimal bagi infrastruktur yang produktif dan dampak jangka panjangnya terhadap output (Pritchett, 2000; Caselli, 2004).

Sejauh mana dampak belanja modal (Δi) dapat meningkatkan output potensial adalah faktor kunci yang menentukan dinamika rasio surplus/defisit APBD terhadap PDRB (Δd) , sekaligus menentukan kemandirian daerah terhadap dana perimbangan (h) dalam jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan waktu, meningkatnya skala ekonomi dari belanja modal akan mempengaruhi rasio surplus/defisit anggaran terhadap PDRB dan beban pembiayaan pada tahun yang sama yang identik dengan selisih tingkat suku bunga (r) dengan pertumbuhan ekonomi (g) . Dengan demikian persamaan (1) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$(r - g)(\Delta d + h) = (r - g)[(1 - \mu\tau)\Delta i] \quad (2)$$

Tekanan terhadap surplus/defisit APBD (Δd) sekaligus kebutuhan injeksi pembiayaan dari pemerintah pusat (h) akan tergantung pada dua parameter; pertama, elastisitas jangka panjang output terhadap tase kenaikan belanja modal daerah dan yang kedua, kemampuan belanja modal mendorong kapasitas ekonomi yang selanjutnya mendorong kapasitas fiskal daerah yang ditunjukkan dengan meningkatnya marginal tax ratio (τ) .

$$\tau\Delta Y = \tau\epsilon_y \Delta i \quad (3)$$

dimana ε adalah elastisitas jangka panjang belanja modal terhadap output, y_0 adalah kondisi awal rasio output terhadap belanja modal. Selanjutnya menggabungkan persamaan (2) dan persamaan (3) secara bersama menunjukkan jika multiplier jangka pendek dan elastisitas output terhadap belanja modal cukup besar, sehingga memenuhi persamaan berikut:

$$(r - g)(1 - \mu\tau) - \tau\varepsilon y_0 \leq 0 \quad (4)$$

maka belanja modal akan mendorong kapasitas ekonomi dan fiskal dalam jangka panjang untuk menciptakan basis penerimaan daerah dan sekaligus mengurangi ketergantungan daerah kepada dana perimbangan^(h).

Penutup

Paper singkat ini mengembangkan konstruksi model teoritik yang diharapkan berguna sebagai *framework* untuk menilai efektivitas belanja modal dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah berjalan hampir dua puluh tahun dengan wataknya yang khas. Konstruksi model yang dikembangkan dimulai dengan fondasi teori dan tujuan desentralisasi dimulai dengan teori desentralisasi generasi awal, teori generasi kedua yang menekankan bekerjanya mekanisme akuntabilitas dan *check and balance* melalui proses politik serta review kritis terhadap teori generasi kedua yang saat ini berkembang memperkaya literatur desentralisasi. Review kritis tersebut relevan terutama bagi negara *young democracy* dengan heterogenitas daerah yang sangat tinggi seperti di Indonesia. Fondasi teori desentralisasi tersebut berguna untuk merefleksikan kembali harapan manfaat dari pelaksanaan desentralisasi, cara bagaimana manfaat tersebut bisa diperoleh, kendala yang masih dihadapi serta kebijakan yang perlu dilakukan. Diharapkan paper singkat ini akan mendapatkan respon dari para pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti, baik tindak lanjut berupa riset empiris, maupun tindak lanjut kebijakan.

Referensi

- ³ Auerbach, B. A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). *Measuring the Output Responses to Fiscal Policy*. *American Economic Journal : Economic Policy*, 4(2), 1–27.
- ⁸ Besley, T., & Case, A. (1995). *Incumbent Behavior: Vote-Seeking, Tax-Setting, and Yardstick Competition*. *American Economic Review*, 85(1), 25–45.
- ⁷ Capuno, J. J., Quimbo, S. A., Kraft, A. D., Tan, C. A. R. J., & Fabella, V. M. B. (2012). *Perks and public provisions: Effects of yardstick competition on local government fiscal behavior in the Philippines*. HEFPA Working Paper, (2012-08).
- ² Caselli, F. (2004). *Accounting for Cross-Country Income Differences*. *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*, 10828.
- ¹³ Delong, J Bradford & Summers, L. (2012). *Fiscal Policy in a Depressed Economy*. *Brooking Papers on Economic Activity*, summer, 233–298.
- ¹⁵ Martinez-vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). *Fiscal Decentralization and Economic Growth*, 31(9), 1597–1616. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00109-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8)
- ¹⁶ Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- ¹⁴ Oates, W. E. (2005). *Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism*, 31(9), 1597–1616.
- ¹ Pritchett, L. (2000). *The Tyranny of Concepts: CUDIE (Cumulated, Depreciated, Investment Effort) Is Not Capital*. *Journal of Economic Growth*, 5, 361–384. Retrieved from <https://doi.org/>

org/10.1023/A:1026551519329

¹¹ Qian, Y., & Weingast, B. R. (1997). *Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives*, 11(4), 83–92.

⁹ Revelli, F. (2006). *Performance rating and yardstick competition in social service provision*. *Journal of Public Economics*, 90(3), 459–475. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jpu-beco.2005.07.006>

⁶ Revelli, F., & Tovmo, P. (2007). *Revealed yardstick competition: Local government efficiency patterns in Norway*. *Journal of Urban Economics*, 62(1), 121–134.

¹² Salmon, P. (2009). *Decentralization as an incentive scheme when regional differences are large*. In *annual conference of the Associazione Italiana di Scienze Regionali* (pp. 9–11). Florence (Italy).

¹⁰ Straub, S. (2011). *Infrastructure and Development : A Critical Appraisal of the Macro-level Literature*. *The Journal of Development Studies*, 47(05), 683–708.

⁵ Tiebout, C. M. . (1956). *A Pure Theory of Local Expenditures*. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1826343z>

Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan_Mengukur Efektivitas Belanja Modal Daerah Dalam Mendorong Investasi Di Daerah 2018 Edisi 2

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Econpapers.repec.org

Internet Source

<1%

2

[Submitted to Oxford Brookes University](#)

Student Paper

<1%

3

hrcak.srce.hr

Internet Source

<1%

4

id.wikipedia.org

Internet Source

<1%

5

kclpure.kcl.ac.uk

Internet Source

<1%

6

madoc.bib.uni-mannheim.de

Internet Source

<1%

7

[Submitted to University of Bristol](#)

Student Paper

<1%

8

docplayer.dk

Internet Source

<1%

9	web.econ.keio.ac.jp Internet Source	<1%
10	hal.univ-lorraine.fr Internet Source	<1%
11	dobrerzadzenie.msap.pl Internet Source	<1%
12	ledi.u-bourgogne.fr Internet Source	<1%
13	tampub.uta.fi Internet Source	<1%
14	www.businessperspectives.org Internet Source	<1%
15	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1%
16	Chang Woon Nam, Rüdiger Parsche, Matthias Steinherr. "The Principles of Parallel Development of Fiscal Capacity between State and Municipalities as Useful Benchmarks for the Determination of the Inter-governmental Grants in Germany", European Planning Studies, 2009 Publication	<1%
17	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan_Mengukur Efektivitas Belanja Modal Daerah Dalam Mendorong Investasi Di Daerah 2018 Edisi 2

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21
